

THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE AND REGIONAL ORIGINAL INCOME (ROI) ON FINANCIAL PERFORMANCE IN THE GOVERNMENT OF THE CITY OF SURABAYA

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Anissak Fitri Ramahdani¹, Sri Trisnaningsih²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

fanisa568@gmail.com¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this research is to look into and assess the impact of local revenue and government size on the Surabaya municipal government's financial performance. This research uses quantitative research methods. In this study, the object of research used is the size of the Surabaya city government in this case, namely total assets and the annual report of Regional Original Revenue (PAD). The sample method applied in this research is purposive sampling method. The analytical method used is the multiple regression analysis and classical assumption test because this analysis is able to measure the strength of two or more variables with the help of the SPSS program. The results based on the results of the t test partially show a significance value of $0.013 < 0.05$ and $t \text{ count} < t \text{ table}$, therefore partially the size of the Regional Government (UPD) has no effect on the Financial Performance of the Regional Government, while based on the results of the t test partially The significance value shows the results of $0.06 < 0.05$ and $t \text{ count} > t \text{ table}$, therefore Regional Original Income (PAD) has an effect on Regional Government Financial Performance.

Keywords : *Government Size, Regional Original Revenue, and Regional Government Financial Performance*

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan guna mengkaji serta menganalisa dampak ukuran pemerintahan serta penghasilan asli daerah atas performa kerja finansial pada pemerintah kota Surabaya. Studi ini memanfaatkan metode riset kuantitatif. Pada studi ini, objek penelitian yang digunakan adalah ukuran pemerintah kota Surabaya dalam hal ini yaitu total asset dan laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode sampel yang diterapkan pada studi ini yakni *metode purposive sampling*. Metode analisa yang dimanfaatkan yakni pengujian asumsi klasik dan analisa regresi ganda karena pada analisis ini mampu mengukur kekuatan variabel dua atau lebih dengan bantuan program SPSS. Hasil riset yang didasari oleh hasil pengujian t secara parsial memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, oleh karena itu secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) tidak berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan berdasarkan hasil uji t secara parsial nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,06 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

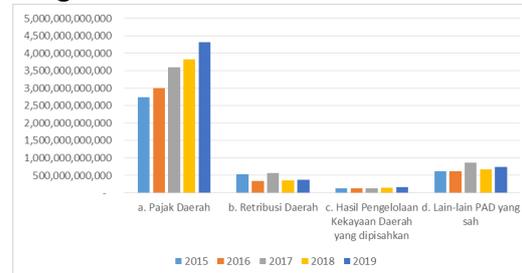
Kata Kunci: Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah (Pemda) merupakan pihak yang menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemda tersebut memiliki lingkup kekuasaan administrative yang lebih terbatas di suatu negara, yang mana di negara Indonesia ini dibagi menjadi beberapa wilayah-wilayah provinsi dan dari daerah-daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi wilayah kota serta kabupaten. Pemerintah daerah ini juga merupakan pihak yang menjalankan roda layanan, pembangunan, serta pemerintahan terhadap penduduk yang memiliki tugas dalam menerapkan kejujuran serta pertanggungjawaban atas pengaturan keuangan supaya dapat terciptanya pemerintah yang transparan. Suatu usaha yang dilakukan oleh Pemda agar terwujudnya akuntabilitas serta transparansi dalam pengaturan finansialnya maka dalam penyajian pelaporan finansial Pemda yang memenuhi prinsip secara sesuai serta sejalan dengan ketentuan akuntansi pemerintah yang sudah didapatkan secara umum yaitu pada PP No. 24 tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang berbasis pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan menetapkan peraturan baik di sektor pajak ataupun di bidang non perpajakan. Kebijakan tersebut diupayakan agar nantinya dapat berdampak pada kenaikan penghasilan asli daerah yang dapat menunjang peningkatan penghasilan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan 3 sumber pendapatan daerah, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) adalah contoh sumber penghasilan terpenting untuk sebuah wilayah sebab penghasilan tersebut seutuhnya berasal serta digali dari kekayaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam hal ini, daerah mempunyai kewenangan penuh

dalam memanfaatkan kekayaan daerah menjadi sumber pendapatan daerah sebanding dengan keperluan serta fokus wilayah tersebut. Daerah yang sukses menaikkan PAD-nya dengan nyata dan konsisten berarti bahwasanya daerah terkait sudah mampu memaksimalkan seluruh bakat yang ada di daerah dengan maksimal



Gambar 1.

Seperti kita ketahui bahwa potensi retribusi serta perpajakan daerah yang Kota Surabaya miliki masih sangat potensial. PAD kota Surabaya kuat di sokong oleh pajak daerah. Pajak Daerah Kota Surabaya di tahun 2019 menyumbang 76,8 persen dari PAD kota Surabaya. Selain pajak daerah, lainlain PAD yang sah mampu menyumbang 13,45 persen dari PAD kota Surabaya, disusul kontribusi retribusi daerah kota Surabaya sebesar 7 persen dari PAD Kota Surabaya.

Pengukuran kinerja adalah contoh unsur yang yang utama juga ketika memberikan sebuah *feedback* atau masukan dari rancangan yang sudah diterapkan. Pengertian tolak ukur performa kerja sendiri merupakan suatu tahap pencatatan, pengukuran capaian berlangsungnya sebuah aktivitas serta pemakaian dana guna mencapai visi-misi lewat perolehan-perolehan yang ada dari segi proses layanan publik, jasa, maupun produk. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja pemerintah merupakan *ouput* dari aktivitas dan program pemerintah yang hendak dilakukan maupun sudah

terlaksana/tercapai berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dengan mutu serta jumlah yang teratur. Selain itu, pengukuran performa kerja finansial Pemda juga penting yang dimana performa kerja finansial Perda merupakan suatu tingkat penapaian dalam sektor perekonomian daerah yang mencakup pendapatan serta pembelanjaan daerah dengan memanfaatkan suatu sistem finansial yang ditentukan dengan adanya sebuah peraturan selama satu periode anggaran. Wujud dari tolak ukur performa kerja itu adalah rasio finansial yang disusun dari sistem pelaporan pertanggung jawaban daerah dalam bentuk rincian APBD.

Menurut latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan dalam melangsungkan studi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya”.

Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah merupakan suatu konstruk/variabel pada ukuran sebuah lingkup instansi dalam suatu wilayah yang bisa dinilai berdasarkan total penghasilan, jumlah pekerja, total aset, serta tingkatan produktivitas. Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa ukuran (*size*) yang besar mampu membantu aktivitas operasional dalam pemerintahan di suatu wilayah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja finansial Pemda. Dengan memiliki skala pemerintah yang besar maka Pemda juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengungkap performa kerja finansialnya. Pemda akan condong melaporkan maupun menerangkan unsur-unsur yang memiliki sifat kabar baik ketika

mengungkapkan pelaporan hasil kerjanya. Kejadian atau aspek yang memiliki sifat baik itu bisa diberikan dalam bentuk pelaporan tentang nilai positif kinerja Pemda terkait guna menaikkan nilai kinerja yang dimiliki (Sumarjo, 2010).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penghasilan daerah yang seutuhnya didapatkan di wilayah terkait serta dimanfaatkan sebagai dasar modal Pemda untuk mendanai usaha-usaha maupun pembangunan daerah guna meminimalisir ketergantungan anggaran dari pemerintahan pusat (Mardiasmoro, 2002). Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh bisa dijadikan tolak ukur untuk menguji performa kerja Pemda, sebab jika PAD makin tinggi yang diterima maka akan memperlihatkan bahwasanya Pemda sanggup mengelola bakat serta kekayaan yang ada di wilayahnya dengan maksimal.

PAD mencakup aspek-aspek diantaranya yakni:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. PAD lainnya yang resmi

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemda merupakan suatu prestasi kerja dari sebuah program yang ada pada sektor finansial daerah yang terdiri dari pendapatan serta pembelanjaan daerah melalui pemanfaatan mekanisme finansial yang telah ditentukan dari sebuah peraturan atau suatu kebijakan undang-undang pada 1 periode anggaran. Performa kerja finansial merupakan ilustrasi pencapaian

penyelenggaraan aktivitas kerja dalam pemerintahan daerah guna menggapai target, visi-misi wilayah yang diukur menggunakan tolak ukur finansial yang ditinjau dari pelaporan keuangan yang sudah disusun oleh pemda terkait.

Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah berdasarkan teori merupakan salah satu unsur yang dijadikan tolak ukur pada pengungkapan kinerja keuangan pada suatu pemerintahan daerah. Pemda yang mempunyai skala pemerintahan yang besar akan mempunyai tanggungjawab yang lebih banyak dalam memiliki performa kerja yang lebih baik. Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian Sari P. (2016) dan Maulina dkk. (2021) pada variabel Skala Pemerintahan Daerah berpengaruh atas performa kerja finansial Pemda terkait. Dari penjelasan tersebut maka perumusan hipotesis yakni:

H_1 : Ukuran Pemerintahan Daerah Berdampak Atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu penghasilan yang diterima atau didapatkan daerah yang diambil menurut kebijakan daerah daerah sejalan dengan kebijakan undang-undang (UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD adalah aspek yang perlu diperhatikan perkembangannya pada setiap tahun. Pemda yang memiliki penghasilan yang tinggi juga memiliki tuntutan untuk mampu memberikan kinerja yang baik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dari penjelasan tersebut maka perumusan hipotesis yakni:

H_2 = Pendapatan asli daerah (PAD) berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Studi ini menggunakan metode studi kuantitatif. Dalam penelitian ini, objek studi yang digunakan adalah ukuran pemerintah kota Surabaya pada aspe tersebut yaitu keseluruhan asset serta laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan tahunan PAD yang dipakai yaitu pada tahun 2011- 2020.

Metode Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Data yang dimanfaatkan pada studi ini merupakan data sekunder. Populasi yang terdapat pada studi ini yakni Pelaporan Realisasi Anggaran serta Pelaporan Neraca Pemerintah Kota Surabaya selama 10 tahun. Tipe sampling yang digunakan di studi ini yakni *purposive sampling* yang dimana penentuan sampel yang berdasarkan pada suatu Pelaporan Realisasi Anggaran dan Pelaporan Neraca yakni Total Aset pada tahun 2011-2020 yang mempunyai relasi erat agar bisa dimanfaatkan dalam pencapaian target studi

Metode Analisis Data

Pengujian Asumsi Klasik serta Analisa Regresi ganda dimanfaatkan untuk menganalisa data karena pada analisis ini mampu mengukur kekuatan variabel dua atau lebih dengan bantuan program SPSS, selain itu untuk membuktikan hipotesis dengan melakukan Uji Hipotesis.

$$Y = \alpha + B_1 X_1 + B_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_1 dan β_2 = Koefisien dari variabel independen

α = Konstanta

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil statistika deskriptif pada tiap-tiap konstruk/variabel pengamatan yang dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UPD	10	31.14	31.46	31.3047	.10084
PAD	10	28.27	29.31	28.9180	.35807
KKPD	10	85.20	109.60	100.4150	7.92680
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Output SPSS yang diolah

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) mempunyai skor terendah senilai 31.14. Pada maximum memiliki nilai sebesar 31.46, sedangkan pada mean terdapat nilai sebesar 31.3047. Pada standar deviasi memiliki nilai senilai 0,10084. Konstruk Pendapatan Asli Daerah (X2) mempunyai skor paling rendah senilai 28.27. Pada maximum memiliki nilai sebesar 29.31, sedangkan pada mean memiliki nilai sebesar 28.9180. Pada standar deviasi memiliki nilai sebesar 0,35807. Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) mempunyai skor paling rendah sebesar 85.20. Pada maximum memiliki nilai sebesar 109.60, sedangkan pada mean memiliki nilai sebesar 100.4150. Pada standar deviasi memiliki nilai sebesar 7.92680.

Uji Normalitas

Dibawah ini merupakan temuan

hasil pengujian normalitas untuk tiap-tiap variabel penelitian yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.40309659
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.179
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada tabel 2. menunjukkan bahwa pada hasil uji normalitas terdistribusi secara normal. Pada hasil pengujian normalitas residual yang memanfaatkan One Sample Kolmogrov Smirnov bisa dilihat dari skor signifikansi senilai 0,200 maka dapat dikatakan memiliki persebaran normal sebab skor sig. > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Untuk uji multikolinearitas yang digunakan pada penelitian yang paling sedikit 2 konstruk/variabel independen untuk digunakan menguji relasi dengan variabel bebasnya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	UPD	.245	4.076
	PAD	.245	4.076

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada hasil pengujian multikolinearitas yaitu pada tabel 3. Memperlihatkan bahwasanya ukuran Pemda serat penghasilan asli daerah mempunyai skor *tolerance* serta VIF

yang sama. Nilai *tolerance* senilai 0,245 > 0,10 dan nilai VIF senilai 4,076 < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan guna mengkaji apabila pada permodelan regresi terdapat adanya perbedaan variasi dari nilai residu sebuah observasi ke observasi lainnya

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-178.762	392.305		-.456	.662
UPD	12.563	15.971	.474	.787	.457
PAD	-7.304	4.498	-.979	-1.624	.148

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada temuan pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4. memperlihatkan bahwasanya setiap variabel pada penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh skor sig. melebihi 0,05.

Uji Autokorelasi

Dalam pengujian autokorelasi memiliki tujuan mengkaji apabila pada permodelan regresi linier terdapat adanya korelasi diantara kekeliruan intervensi di periode t dengan kekeliruan intervensi di periode t-1 terdahulu (Ghozali, 2016).

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.691	.603	4.99264	1.426

a. Predictors: (Constant), PAD, UPD

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada hasil pengujian autokorelasi di tabel 5. Diperlihatkan bahwa skor durbin-watson senilai 1,426 yang di mana pada hasil tersebut

menunjukkan bahwa nilai tersebut dari -2 hingga +2 yang bisa diambil simpulan tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Menurut (Sugiarto, 2015) analisa regresi ganda mempunyai maksud guna menganalisa wujud relasi diantara konstruk bebas dengan konstruk terikat

Tabel 6. Hasil Analisis Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2461.006	818.436		3.007	.020
UPD	-109.649	33.319	-1.395	-3.291	.013
PAD	37.068	9.383	1.674	3.950	.006

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Didasari pada tabel diatas maka didapatkan persamaan analisis regresi berganda yakni dijelaskan menjadi :

$$Y = \alpha + B_1 X1 + B_2 X2 + \epsilon$$

$$Y = 2461,006 + (-109,649) X1 + 37,068 X2$$

Nilai konstanta senilai 2461,006 yang berarti jika konstruk bebas dinilai konstan atau memiliki nilai 0, hal tersebut berarti kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) diprediksi sebesar 2461,006. Nilai koefisien pada regresi variabel variabel ukuran pemerintah daerah (UPD) (X1) sebesar -109,649 menunjukkan bahwa nilai (X1) yang negatif. Hal tersebut berarti adanya pengaruh negatif dari UPD dalam hal ini yang digambarkan dengan total aset dengan variabel performa kerja finansial pemerintahan kota Surabaya. Skor koef. pada regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) sebesar 37,068 menunjukkan bahwa nilai (X2) yang positif. Hal tersebut berarti adanya pengaruh positif dari PAD dengan konstruk performa kerja finansial pemerintahan Kota Surabaya.

Uji F

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa pengujian dampak bersamaan ini dimanfaatkan guna mengidentifikasi apabila konstruk bebas secara simultan atau bersamaan memberi dampak untuk konstruk terikat. Dasar pengambilan keputusan pada uji F adalah jika skor F melebihi skor F tabel maka hipotesis alternative yang menyatakan bahwa semua konstruk independen atau bebas secara bersamaan berpengaruh atas konstruk dependen atau terikat dapat diterima dan pada skor sig. dibawah 0,05. Pada penelitian ini pada F tabel sebesar 4,46 dengan menggunakan rumus perhitungan F tabel yaitu $F(k; n-k)$.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2461.006	818.436		3.007	.020
	UPD	-109.649	33.319	-1.395	-3.291	.013
	PAD	37.068	9.383	1.674	3.950	.006

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada tabel 7. Memperlhatikan bahwa temuan nilai signifikansi $0,16 > 0,05$. Nilai hasil F hitung sebesar $7,844 > 4,46$ F tabel. Maka hal tersebut memperlihatkan bahwasanya ada dampak dari Ukuran Pemerintah dan PAD dengan bersamaan atas performa kerja finansial Pemerintahan Kota Surabaya.

Uji t

Menurut (Ghozali, 2016) uji t dimanfaatkan mengetahui dampak pada tiap-tiap konstruk bebas pada konstruk terikat. Pengambilan keputusan pada uji t apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan t hitung >

t tabel maka secara parsial ada dampak antar variabel independen dengan variabel dependen begitupun sebaliknya. Pada penelitian ini nilai t tabel sebesar 2,365 dengan memanfaatkan rumus perhitungan t tabel yaitu $t(a/2; n-k-1)$.

Tabel 8. Hasil Uji t

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	391.022	2	195.511	7.844	.016 ^b
	Residual	174.485	7	24.926		
	Total	565.508	9			

a. Dependent Variable: KKPD
b. Predictors: (Constant), PAD, UPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada tabel 8. menunjukkan bahwasanya konstruk Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013. Untuk nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Pada nilai t hitung variabel UPD sebesar -3,291 lebih kecil dari 2,365. Maka hal tersebut berarti secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya (Y). Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) memiliki nilai signifikansi senilai $0,006 < 0,05$. Pada nilai t hitung variabel PAD senilai 3,950 lebih besar dari 2,365. Maka hal tersebut secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Uji Koefisien Determinasi

Ghozali (2016) menjelaskan koef. determinasi (R^2) digunakan guna melakukan pengukuran tahap kapabilitas model rangka untuk menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.691	.603	4.99264

a. Predictors: (Constant), PAD, UPD

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pada tabel 9. menunjukkan hasil dari nilai uji koefisien determinasi adalah 0,603 atau 60,3. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen atau bebas (X1,X2) secara bersamaan atas konstruk dependen atau terikat (Y) sebesar 60,3% sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t secara parsial memperlihatkan bahwasanya UPD tidak berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Pada nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,013 < 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, oleh karena itu secara parsial Ukuran Pemeintah Daerah (UPD) tidak berpengaruh atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t secara parsial memperlihatkan bahwasanya PAD berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Pada nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,06 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, oleh karena itu secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji t secara parsial memperlihatkan bahwasanya Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) tidak berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pada skor signifikansi menunjukkan hasil senilai $0,013 < 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, oleh karena itu secara parsial Ukuran Pemeintah Daerah (UPD) tidak berpengaruh atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan hasil uji t secara parsial memperlihatkan bahwasanya PAD berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pada nilai signifikansi menunjukkan hasil senilai $0,06 < 0,05$ serta t hitung diatas t tabel, maka dari itu secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya diharapkan dapat memaksimalkan skala pemerintahan daerah lewat total aset melalui cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan aset, mengoperasikan aset, memelihara aset, atau biasa yang disebut dengan manajemen aset. Hal tersebut mampu membantu untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan untuk melaukan operasional dan roda pemerintahan daerah agar dapat mengoptimalkan kinerja finansial Pemerintahan Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://surabayakota.bps.go.id/>
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Maulina A. , Alkamal M., dan Fahira S. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.
- Mulyani, S. dan H. Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen* 15(1): 57-66.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahma P. A. R. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1-19.
- Rizki Hamdani, 2017. “ Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”. Skripsi. Medan: Universitas Sumetara Utara.
- Sarawati D. dan Rioni S. Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

- Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679-692.
- Sari P. dan Mustanda K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Sugiarto.
2015. *Metode Statistika Bisnis*. Matana Publishing. Tangerang
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cv. Alfabeta. Sugiyono.
- (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. (Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah